OPTIMALISASI DIVERSIFIKASI SUMBER PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Arya Gandhi Putra Ahmad
NPP. 33.0218
Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Keuangan Publik
Email: aryagandhi751@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Decky Dwi Utomo, MM
Email: decky_dwi@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The BLUD Laboratory of the Environment and Land Agency (DLHP) of South Sumatra Province still faces a very high dependence on laboratory service revenue, namely 132.56% of revenue in 2024 comes from one main source. Meanwhile, revenue from collaboration and other businesses is still relatively low and has not developed optimally. This condition is reinforced by the trend of revenue growth in 2020–2024 which began to experience a slowdown and even a decline in 2024 by -1.19%, thus indicating symptoms of revenue stagnation and suboptimal diversification of BLUD revenue sources.* ***Purpose:*** *This study aims to determine the optimization of revenue source diversification carried out at the Regional Public Service Agency (BLUD) DLHP Laboratory of South Sumatra Province.* ***Method:*** *This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The theory used in this study is the optimization theory according to Mardiasmo (2018).* ***Result:*** *The research results indicate that, from an effectiveness perspective, revenue performance has demonstrated quite good achievements, but is still dominated by services, so diversification has not been optimal. From an efficiency perspective, cost management has been carried out quite well, although operational costs remain high; and from an economic perspective, budget utilization has been prioritized but not yet fully optimized.* ***Conclusion:*** *Optimization of revenue source diversification at the BLUD Laboratory DLHP of South Sumatra Province has not been fully optimal. The research recommends strengthening the revenue diversification strategy by increasing the contribution of the cooperation development sector and the utilization of other businesses, as well as controlling operational costs.*

Keywords: *Optimization, Revenue Diversification, BLUD, PAD*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): BLUD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pendapatan jasa layanan laboratorium, yakni 132,56% pendapatan tahun 2024 berasal dari satu sumber utama. Sementara itu, pendapatan dari kerja sama dan usaha lainnya masih relatif rendah dan belum berkembang optimal. Kondisi ini diperkuat oleh tren pertumbuhan pendapatan tahun 2020–2024 yang mulai mengalami perlambatan bahkan penurunan pada tahun 2024 sebesar -1,19%, sehingga menunjukkan adanya gejala stagnasi pendapatan dan belum optimalnya diversifikasi sumber pendapatan BLUD. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi diversifikasi sumber pendapatan dilakukan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Laboratorium DLHP Provinsi Sumatera Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori optimalisasi menurut Mardiasmo (2018). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek efektivitas menunjukkan kinerja pendapatan telah menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih didominasi oleh jasa layanan sehingga diversifikasi belum berjalan maksimal; dari aspek efisiensi, pengelolaan biaya telah dilakukan dengan cukup baik meskipun biaya operasional masih tinggi; dan dari aspek ekonomis, penggunaan anggaran telah mengacu pada prioritas namun belum sepenuhnya optimal. **Kesimpulan:** Optimalisasi diversifikasi sumber pendapatan pada BLUD Laboratorium DLHP Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya optimal. Adapun saran penelitian ini yakni penguatan strategi diversifikasi pendapatan dengan meningkatkan kontribusi sektor pengembangan kerja sama dan pemanfaatan usaha lainnya serta pengendalian terhadap biaya operasional.

Kata Kunci: Optimalisasi, Diversifikasi Pendapatan, BLUD, PAD

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi manajemen keuangan sektor publik merupakan agenda penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui prinsip *good governance* (Suwanda et al., 2019). Perubahan paradigma ini mendorong birokrasi untuk tidak lagi berorientasi pada aturan semata, tetapi berfokus pada kinerja dan hasil pelayanan publik (Akbar, 2013; Sam, A.A.R., dkk., 2024). Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengelola keuangan dan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Jeddawi, 2021; Sinurat & Panjaitan, 2017). Namun demikian, data nasional menunjukkan bahwa kapasitas fiskal sebagian besar daerah di Indonesia masih tergolong rendah dan sangat bergantung pada transfer pusat (Sinurat, 2017). Kementerian Keuangan (2024) mencatat bahwa rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD daerah di Indonesia masih berada di bawah 30%, yang menunjukkan keterbatasan

kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pelayanan publik secara mandiri. Berdasarkan temuan Hummel & Kusumasari (2025) serta Kurniawan & Purwanto (2022), kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia masih tergolong rendah dan belum mampu mendukung kemandirian fiskal daerah secara optimal. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru di luar pajak dan retribusi konvensional (Bird, 2015; Wardiah, 2024).

Salah satu instrumen strategis yang dikembangkan adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berbasis kinerja (Suryanto & Nurdin, 2021). Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen strategis dalam reformasi pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berbasis kinerja dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan publik (Peters & Pierre, 2016; Salomo & Rahmayanti, 2023). BLUD tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan publik, tetapi juga sebagai entitas yang berpotensi meningkatkan PAD melalui diversifikasi sumber pendapatan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Secara normatif, BLUD dapat mengembangkan pendapatan dari jasa layanan, kerja sama, serta pendapatan usaha lainnya seperti pemanfaatan aset dan investasi.

BLUD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu unit yang telah menerapkan pola pengelolaan BLUD berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 137/KPTS/DLHP/2017. Unit ini menyediakan layanan pengujian kualitas air, tanah, dan udara bagi sektor publik maupun swasta, sehingga memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber pendapatan alternatif. Namun, dalam praktiknya, optimalisasi diversifikasi pendapatan masih belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari struktur pendapatan BLUD yang masih sangat didominasi oleh jasa layanan laboratorium. Berikut disajikan data tren pendapatan BLUD dalam lima tahun terakhir sebagaimana tersaji pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Rincian Tren Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah 2020-2024

No	Tahun	Pendapatan (Rp)
1	2020	16,132,812,560
2	2021	19,697,732,597
3	2022	27.089.098.028
4	2023	28.664.550.618
5	2024	28.322.723.418

Sumber: SP3B DLHP Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan data pada Tabel 1 diatas, dijelaskan bahwa pada tahun 2020–2022, pendapatan BLUD meningkat dari Rp16,13 miliar menjadi Rp27,08 miliar. Namun, pertumbuhan mulai melambat pada 2023 menjadi Rp28,66 miliar (hanya naik 5,82%), dan pada 2024 justru mengalami penurunan menjadi Rp28,32 miliar atau turun -1,19%. Pola ini menunjukkan indikasi stagnasi

pertumbuhan pendapatan yang mengarah pada ketergantungan terhadap satu sumber utama, yaitu jasa layanan laboratorium.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024, total pendapatan BLUD mencapai Rp28,32 miliar atau 131,73% dari target. Namun, lebih dari 99% pendapatan berasal dari jasa layanan sebesar Rp28,06 miliar, sedangkan pendapatan kerja sama hanya Rp5 juta (50% dari target Rp10 juta) dan pendapatan usaha lainnya sebesar Rp254,43 juta (79,51%). Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan non-layanan masih sangat rendah dan belum berkembang secara optimal. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya gejala stagnasi pada tren pertumbuhan pendapatan BLUD, di mana laju peningkatan pendapatan mulai melambat akibat ketergantungan yang tinggi pada jasa layanan laboratorium. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tanpa penguatan strategi diversifikasi melalui kerja sama, optimalisasi aset, serta inovasi layanan, BLUD berpotensi mengalami penurunan kinerja pendapatan di masa mendatang.

Secara umum, permasalahan utama yang dihadapi BLUD UPTD Laboratorium DLHP Provinsi Sumatera Selatan adalah dominasi sumber pendapatan dari jasa layanan, sementara potensi pendapatan lain seperti kerja sama dan usaha lainnya belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara kondisi ideal yang diatur dalam prinsip optimalisasi pengelolaan keuangan (Mardiasmo, 2018), yaitu efektif, efisien, dan ekonomis, dengan realitas implementasi di lapangan. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan pengelolaan BLUD agar lebih adaptif dan berkelanjutan (Ari Ardiansyah, 2023).

Adapun penelitian terdahulu mengenai diversifikasi pendapatan BLUD masih terbatas. Salah satunya dilakukan oleh Siregar dkk. (2024) yang meneliti optimalisasi diversifikasi pendapatan pada tingkat pemerintah daerah. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus objek, yaitu pada level BLUD laboratorium, sehingga terdapat *contextual gap* yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi diversifikasi sumber pendapatan BLUD Laboratorium DLHP Sumatera Selatan melalui penerapan prinsip optimalisasi (Mardiasmo, 2018) dalam rangka memperkuat kemandirian finansial serta meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Optimalisasi Diversifikasi Sumber Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan."

1.2. Kesenjangan Penelitian yang Diambil (Research Gap)

BLUD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam memberikan layanan pengujian kualitas lingkungan sekaligus berpotensi menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024, struktur pendapatan BLUD masih sangat didominasi oleh jasa layanan sebesar lebih dari 99%, sedangkan kontribusi pendapatan kerja sama hanya mencapai Rp5 juta (50% dari target) dan pendapatan usaha lainnya sebesar Rp254,43 juta (79,51%). Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan yang sangat tinggi pada satu sumber pendapatan utama, sehingga mengindikasikan belum optimalnya diversifikasi sumber pendapatan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 79 Tahun

2018. Fenomena tersebut juga diperkuat oleh tren pendapatan BLUD dalam lima tahun terakhir (2020–2024) yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan bahkan penurunan pada tahun 2024 sebesar -1,19%. Kondisi ini mengindikasikan adanya gejala stagnasi pendapatan yang menunjukkan bahwa BLUD mulai mengalami keterbatasan dalam mengembangkan sumber pendapatan baru di luar jasa layanan utama. Secara teoritis, BLUD seharusnya mampu memanfaatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk memperluas sumber pendapatan melalui kerja sama, optimalisasi aset, dan inovasi layanan. Namun, realitanya menunjukkan bahwa potensi tersebut belum dimaksimalkan secara optimal.

Beberapa penelitian sebelumnya masih banyak berfokus pada analisis kinerja keuangan, efektivitas BLUD, serta pengukuran rasio keuangan, namun belum secara spesifik mengkaji optimalisasi diversifikasi sumber pendapatan pada BLUD laboratorium. Sementara itu, secara kontekstual, penelitian mengenai diversifikasi pendapatan lebih banyak dilakukan pada level pemerintah daerah atau sektor lain seperti kesehatan dan perbankan, sehingga belum banyak yang mengkaji secara khusus pada BLUD laboratorium lingkungan yang memiliki karakteristik layanan teknis, berbasis jasa pengujian, dan memiliki potensi kerja sama yang luas. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam optimalisasi diversifikasi sumber pendapatan pada BLUD Laboratorium DLHP Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan kemandirian finansial dan kontribusi terhadap PAD.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena berkaitan dengan kebutuhan penguatan kemandirian fiskal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui optimalisasi diversifikasi sumber pendapatan. BLUD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan saat ini menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap jasa layanan laboratorium, di mana lebih dari 99% pendapatan masih berasal dari satu sumber utama. Sementara itu, kontribusi pendapatan dari kerja sama dan usaha lainnya masih relatif rendah dan belum berkembang secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya keterbatasan struktur pendapatan yang berpotensi menghambat keberlanjutan fiskal BLUD dalam jangka panjang.

Penelitian ini juga menjadi penting secara keilmuan karena memberikan gambaran empiris mengenai implementasi konsep diversifikasi pendapatan pada BLUD sektor laboratorium lingkungan, yang masih relatif jarang dikaji dalam literatur manajemen keuangan sektor publik. Sebagian besar kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada BLUD sektor kesehatan atau pada analisis kinerja keuangan secara umum, sehingga belum banyak memberikan perhatian pada strategi pengembangan sumber pendapatan alternatif pada BLUD berbasis layanan teknis lingkungan. Secara praktis, penelitian ini memberikan urgensi bagi pemerintah daerah dan pengelola BLUD dalam merumuskan strategi penguatan pendapatan yang lebih adaptif dan berkelanjutan, khususnya melalui pengembangan kerja sama strategis, optimalisasi aset, serta inovasi layanan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam

pengambilan kebijakan untuk memperkuat kontribusi BLUD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan layanan publik.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai pengelolaan keuangan BLUD, diversifikasi pendapatan, dan kemandirian fiskal daerah. Penelitian Sulistyowati dan Sunaningsih (2022) menunjukkan bahwa penerapan BLUD pada puskesmas mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan melalui fleksibilitas pengelolaan anggaran. Namun penelitian tersebut lebih berfokus pada perbandingan sebelum dan sesudah penerapan BLUD dan belum mengkaji pengembangan sumber pendapatan secara lebih luas. Penelitian Ari Ardiansyah (2023) menjelaskan bahwa tata kelola keuangan BLUD di sektor kesehatan dapat dianalisis melalui berbagai indikator rasio keuangan untuk melihat tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan BLUD, tetapi pembahasannya masih bersifat deskriptif dan belum menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi pendapatan secara mendalam.

Sementara itu, penelitian Reni Farwitawati (2024) menunjukkan bahwa penerapan BLUD pada rumah sakit daerah memberikan perubahan terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan sebagai alat ukur utama, namun belum membahas strategi diversifikasi pendapatan maupun pengembangan sumber pendapatan alternatif dalam pengelolaan BLUD. Penelitian Helly Aroza Siregar dkk. (2024) menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa inovasi sumber pendapatan menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, namun kajiannya masih berada pada level pemerintah daerah secara umum dan belum secara spesifik membahas BLUD sebagai entitas pengelola layanan publik. Selain itu, penelitian Marshella Putri et al. (2024) menjelaskan bahwa diversifikasi pendapatan memiliki hubungan dengan penurunan fiscal stress dan ketergantungan fiskal daerah. Penelitian ini memperkuat pentingnya pengembangan sumber pendapatan alternatif dalam konteks desentralisasi fiskal, tetapi lebih berfokus pada analisis makro antarprovinsi dan belum membahas implementasi diversifikasi pendapatan pada organisasi layanan publik daerah. Penelitian Tiara Kusumadewi dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa diversifikasi pendapatan berpengaruh terhadap stabilitas keuangan organisasi. Meskipun penelitian tersebut dilakukan pada sektor perbankan, hasilnya memperlihatkan bahwa ketergantungan pada satu sumber pendapatan dapat memengaruhi keberlanjutan finansial organisasi dalam jangka panjang.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai BLUD dan diversifikasi pendapatan masih lebih banyak berfokus pada sektor kesehatan, analisis rasio keuangan, serta kondisi fiskal daerah secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas optimalisasi diversifikasi sumber pendapatan pada BLUD laboratorium lingkungan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis optimalisasi diversifikasi sumber pendapatan

pada BLUD Laboratorium DLHP Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memperkuat kemandirian finansial dan meningkatkan kontribusi terhadap PAD.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu, baik dari aspek konteks penelitian, fokus kajian, maupun pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian sebelumnya umumnya lebih banyak membahas pengelolaan keuangan BLUD pada sektor kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, analisis rasio keuangan, serta diversifikasi pendapatan pada level pemerintah daerah secara makro. Sementara itu, penelitian ini secara khusus meneliti optimalisasi diversifikasi sumber pendapatan pada BLUD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki karakteristik sebagai unit layanan teknis berbasis jasa pengujian lingkungan.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada fokus kajian yang tidak hanya menilai efektivitas pengelolaan keuangan atau kinerja BLUD, tetapi menganalisis bagaimana diversifikasi sumber pendapatan dapat dioptimalkan untuk memperkuat kemandirian finansial BLUD. Penelitian ini menyoroti pengembangan sumber pendapatan alternatif melalui kerja sama strategis, optimalisasi aset, dan inovasi layanan yang masih jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dari sisi teori, penelitian ini menggunakan konsep optimalisasi pengelolaan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo (2018) yang menekankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan perspektif tersebut diarahkan untuk menganalisis sejauh mana diversifikasi pendapatan BLUD telah berjalan optimal dalam mendukung keberlanjutan fiskal dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi diversifikasi sumber pendapatan dilakukan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Laboratorium DLHP Provinsi Sumatera Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis optimalisasi diversifikasi sumber pendapatan pada BLUD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam pengelolaan sumber pendapatan BLUD, strategi diversifikasi pendapatan, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya optimalisasi dalam meningkatkan kemandirian finansial dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian berpijak pada paradigma konstruktivisme dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*, yaitu Kepala Dinas, pejabat UPTD Laboratorium, staf keuangan, serta pihak terkait lainnya. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti SP3B, Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), regulasi, jurnal, dan laporan keuangan BLUD. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori optimalisasi menurut Mardiasmo (2018) yang mencakup efektivitas, efisiensi, dan ekonomis.

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun kegiatan pengumpulan data dilaksanakan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 5–24 Januari 2026 melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait optimalisasi diversifikasi sumber pendapatan BLUD.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Diversifikasi Sumber Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu upaya dalam memperkuat kemandirian finansial BLUD serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi diversifikasi sumber pendapatan dianalisis menggunakan teori optimalisasi menurut Mardiasmo (2018) yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Adapun pembahasan tiap dimensi adalah sebagai berikut.

3.1. Dimensi Efektivitas

Pada dimensi efektivitas dalam optimalisasi diversifikasi sumber pendapatan BLUD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pendapatan secara umum telah berjalan cukup baik, khususnya pada pencapaian target pendapatan.

Pada indikator ketercapaian target pendapatan, data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024 menunjukkan bahwa target pendapatan sebesar Rp21,5 miliar berhasil direalisasikan sebesar Rp28,32 miliar atau mencapai 131,73 persen. Pendapatan jasa layanan menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp28,06 miliar atau 132,56 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Laporan Realisasi Anggaran BLUD 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Total Pendapatan	Rp21.500.000.000	Rp28.322.723.418	**131,73%**
Pendapatan Jasa Layanan	Rp21.170.000.000	Rp28.063.291.442	**132,56%**
Pendapatan Hasil Kerja Sama	Rp10.000.000	Rp5.000.000	**50,00%**

Pendapatan Usaha Lainnya	Rp320.000.000	Rp254.431.976	**79,51%**

Sumber: LRA DLHP Provinsi Sumatera Selatan, Diolah Penulis

Capaian tersebut menunjukkan bahwa BLUD mampu menjaga stabilitas permintaan jasa laboratorium lingkungan. Hal ini diperkuat melalui wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa "permintaan jasa pengujian lingkungan terus meningkat sehingga realisasi pendapatan mampu melampaui target setiap tahunnya." Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kepala Bagian Keuangan UPTD Laboratorium yang menjelaskan bahwa capaian pendapatan rata-rata berada pada kisaran 85–100 persen setiap tahun meskipun terkadang dipengaruhi kondisi eksternal seperti penurunan aktivitas industri. Namun demikian, tingginya realisasi pendapatan masih didominasi oleh jasa layanan laboratorium sehingga efektivitas yang tercapai masih bersifat internal dan belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan diversifikasi sumber pendapatan.

Selanjutnya, indikator kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi BLUD terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan masih relatif kecil meskipun secara nominal pendapatan terus meningkat. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa total PAD Provinsi Sumatera Selatan mencapai Rp5,31 triliun, sedangkan pendapatan BLUD Laboratorium sebesar Rp28,32 miliar atau hanya berkontribusi sekitar 0,53 persen terhadap PAD daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan BLUD belum memberikan dampak signifikan terhadap struktur pendapatan daerah secara keseluruhan. Secara substantif, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa optimalisasi pendapatan masih terfokus pada pemenuhan target organisasi dan belum berkembang menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Rendahnya kontribusi ini juga dipengaruhi belum optimalnya pengembangan sumber pendapatan alternatif seperti kerja sama strategis, pemanfaatan aset, maupun layanan usaha lainnya yang hingga tahun 2024 realisasinya masih sangat kecil. Pendapatan hasil kerja sama misalnya hanya terealisasi Rp5 juta atau 50 persen dari target, sedangkan pendapatan usaha lainnya hanya mencapai Rp254 juta atau 79,51 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pendapatan masih belum merata pada seluruh sumber pendapatan BLUD.

Terakhir, pada indikator peningkatan kualitas layanan, hasil penelitian menunjukkan bahwa BLUD telah melakukan berbagai upaya peningkatan mutu pelayanan melalui penerapan standar ISO/IEC 17025, penguatan sistem manajemen mutu laboratorium, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Upaya tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah layanan pengujian pada periode 2021–2023. Data Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah sampel pengujian meningkat dari 14.304 sampel pada tahun 2021 menjadi 20.631 sampel pada tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan pengguna jasa terhadap kualitas layanan laboratorium. Hal ini diperkuat melalui wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa "kualitas hasil pengujian menjadi prioritas utama karena menjadi dasar kepercayaan pengguna jasa terhadap laboratorium." Namun demikian, pada tahun 2024 jumlah

sampel mengalami penurunan menjadi 10.012 sampel sehingga menunjukkan adanya perlambatan permintaan layanan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas layanan masih lebih banyak diarahkan untuk mempertahankan pendapatan jasa layanan utama dan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menciptakan inovasi layanan baru maupun pengembangan kerja sama strategis sebagai bagian dari diversifikasi sumber pendapatan. Dapat disimpulkan, efektivitas pengelolaan pendapatan BLUD sudah cukup baik dari sisi pencapaian target dan kualitas layanan, namun belum optimal dalam menciptakan struktur pendapatan yang lebih beragam dan berkelanjutan.

3.2. Dimensi Efisiensi

Dimensi efisiensi dalam optimalisasi diversifikasi sumber pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa kemampuan organisasi dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan biaya operasional masih belum stabil. Pada indikator perbandingan biaya dengan pendapatan, data SP3B UPTD Laboratorium DLHP memperlihatkan bahwa pada tahun 2022 kondisi keuangan masih tergolong efisien. Berikut disajikan data perbandingan pengeluaran dan pendapatan BLUD sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Rincian Pendapatan dan Pengeluaran BLUD

No.	Tahun	Pendapatan	Pengeluaran
1.	2022	27,089,098,028	23,698,359,066
2.	2023	28,664,550,618	29,147,640,224
3.	2024	28,322,723,418	31,236,984,785

Sumber: SP3B UPTD Laboratorium DLHP

Berdasarkan tabel diatas, dilihat bahwa pada tahun 2022, pendapatan sebesar Rp27,08 miliar mampu melampaui pengeluaran Rp23,69 miliar. Namun kondisi tersebut berubah pada tahun 2023 dan 2024 ketika pengeluaran meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Tahun 2023 mencatat pengeluaran Rp29,14 miliar, lebih tinggi dibanding pendapatan Rp28,66 miliar, sedangkan tahun 2024 defisit kembali terjadi dengan pendapatan Rp28,32 miliar dan pengeluaran mencapai Rp31,23 miliar. Secara substantif, kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan belum diikuti pengendalian biaya yang optimal. Ketergantungan terhadap jasa layanan laboratorium sebagai sumber utama pendapatan menyebabkan kemampuan keuangan BLUD menjadi rentan ketika terjadi perlambatan permintaan layanan atau peningkatan biaya operasional. Artinya, efisiensi pengelolaan belum sepenuhnya mendukung tujuan diversifikasi pendapatan karena struktur pendapatan masih didominasi satu sumber utama dan belum ditopang oleh pendapatan alternatif yang mampu memperkuat stabilitas keuangan organisasi.

Sementara itu, pada indikator pemanfaatan sumber daya secara optimal, hasil penelitian menunjukkan bahwa BLUD telah memiliki sarana dan prasarana yang relatif memadai, namun pemanfaatannya belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber pendapatan baru. Berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2025, tingkat kelengkapan alat laboratorium mencapai 95 persen dengan kondisi alat baik sebesar 95 persen, sedangkan kalibrasi alat baru mencapai 80 persen dari standar minimal. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana ruangan berada pada angka 90 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya sebenarnya cukup mendukung operasional layanan, tetapi masih terdapat keterbatasan pada aspek pemeliharaan, standardisasi alat, dan kapasitas ruang layanan. Secara lebih mendalam, kondisi ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan sumber daya masih berfokus pada menjaga operasional layanan rutin dibandingkan dimanfaatkan secara strategis untuk inovasi layanan atau pengembangan kerja sama eksternal. Padahal, peralatan laboratorium yang tersedia memiliki potensi untuk mendukung berbagai layanan tambahan seperti pengujian khusus, penelitian lingkungan, maupun kerja sama teknis dengan sektor industri.

Dapat disimpulkan bahwa efisiensi pemanfaatan sumber daya pada BLUD Laboratorium DLHP Provinsi Sumatera Selatan masih belum optimal karena sumber daya yang dimiliki belum sepenuhnya digunakan sebagai instrumen pengembangan diversifikasi pendapatan secara berkelanjutan.

3.3. Dimensi Ekonomis

Pada dimensi ekonomis dalam optimalisasi diversifikasi sumber pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya keuangan belum sepenuhnya diarahkan secara strategis untuk mendukung pengembangan sumber pendapatan baru. Pada indikator penggunaan dana secara tepat, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih difokuskan pada kebutuhan operasional rutin seperti belanja barang dan jasa, pemeliharaan alat laboratorium, serta pengadaan sarana penunjang layanan. Data SP3B UPTD Laboratorium DLHP menunjukkan bahwa pada tahun 2022 pendapatan BLUD sebesar Rp27.089.098.028 masih mampu menutupi pengeluaran sebesar Rp23.698.359.066 sehingga terjadi surplus sekitar Rp3,39 miliar. Namun kondisi tersebut berubah pada tahun 2023 ketika pendapatan sebesar Rp28.664.550.618 tidak mampu mengimbangi pengeluaran yang meningkat menjadi Rp29.147.640.224 sehingga terjadi defisit sekitar Rp483 juta. Pada tahun 2024 kondisi kembali memburuk ketika pendapatan sebesar Rp28.322.723.418 berada di bawah pengeluaran sebesar Rp31.236.984.785 atau mengalami defisit sekitar Rp2,91 miliar. Secara substantif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan dana masih lebih diarahkan untuk mempertahankan operasional layanan utama dibandingkan mendukung investasi strategis dalam pengembangan layanan baru maupun diversifikasi sumber pendapatan. Akibatnya, anggaran yang tersedia belum mampu dimanfaatkan secara optimal untuk membuka peluang kerja sama, inovasi layanan, ataupun pengembangan usaha lainnya yang dapat memperkuat kemandirian keuangan BLUD secara berkelanjutan.

Pada indikator rasionalitas tarif pelayanan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tarif layanan pada BLUD Laboratorium DLHP Provinsi Sumatera Selatan secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan pada UPTD Laboratorium Lingkungan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa tarif ditetapkan berdasarkan biaya satuan layanan, kemampuan masyarakat, serta prinsip kepatutan dan keadilan. Dari sisi pendapatan, tarif layanan laboratorium masih menjadi sumber utama penerimaan BLUD. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024, pendapatan jasa layanan mencapai Rp28.063.291.442 atau sekitar 99 persen dari total pendapatan BLUD sebesar Rp28.322.723.418. Sementara itu, pendapatan hasil kerja sama hanya sebesar Rp5.000.000 dan pendapatan usaha lainnya sebesar Rp254.431.976. Data tersebut menunjukkan bahwa struktur pendapatan masih sangat bergantung pada tarif jasa layanan laboratorium. Secara substantif, kondisi ini memperlihatkan bahwa tarif pelayanan memang telah mampu menghasilkan pendapatan yang besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen untuk mendorong diversifikasi sumber pendapatan. Selain itu, meningkatnya biaya operasional hingga mencapai Rp31,23 miliar pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pendapatan berbasis tarif layanan belum sepenuhnya mampu menjaga keseimbangan keuangan organisasi. Padahal, keberagaman layanan laboratorium sebenarnya membuka peluang pengembangan tarif baru berbasis layanan khusus, kerja sama teknis, maupun paket pengujian terpadu. Dengan demikian, rasionalitas tarif pelayanan pada BLUD Laboratorium DLHP Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai secara regulatif, namun implementasinya masih belum optimal dalam mendukung penguatan diversifikasi dan stabilitas pendapatan jangka panjang.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi diversifikasi sumber pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan secara umum telah berjalan cukup baik dari sisi pencapaian pendapatan, namun belum sepenuhnya mampu menciptakan struktur pendapatan yang seimbang dan berkelanjutan. Data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024 menunjukkan bahwa total pendapatan BLUD mencapai Rp28.322.723.418 atau 131,73 persen dari target sebesar Rp21.500.000.000. Akan tetapi, dari total tersebut sekitar Rp28.063.291.442 atau hampir 99 persen masih berasal dari jasa layanan laboratorium. Sementara itu, pendapatan hasil kerja sama hanya sebesar Rp5.000.000 dan usaha lainnya sebesar Rp254.431.976. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan pendapatan masih bersifat kuantitatif dan belum mencerminkan keberhasilan diversifikasi sumber pendapatan secara substantif. Dengan kata lain, BLUD mampu meningkatkan pendapatan, tetapi belum mampu mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber utama pendapatan.

Secara substantif, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama BLUD bukan terletak pada rendahnya capaian pendapatan, melainkan pada belum optimalnya transformasi pengelolaan keuangan menuju model pendapatan yang lebih adaptif dan multidimensi. Hal tersebut terlihat dari adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan

pengeluaran dalam dua tahun terakhir. Data SP3B menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi defisit sekitar Rp483 juta, sedangkan tahun 2024 defisit meningkat menjadi sekitar Rp2,91 miliar karena pengeluaran mencapai Rp31,23 miliar sementara pendapatan hanya Rp28,32 miliar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peningkatan pendapatan jasa layanan belum cukup kuat untuk menopang kenaikan biaya operasional yang terus meningkat. Di sisi lain, pemanfaatan sumber daya laboratorium seperti peralatan, ruang layanan, dan potensi kerja sama eksternal juga belum diarahkan secara maksimal untuk menciptakan layanan baru maupun sumber pendapatan alternatif.

Apabila dikaitkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini secara umum mendukung sekaligus memperluas temuan sebelumnya. Penelitian Sulistyowati dan Sunaningsih (2022), Ari Ardiansyah (2023), serta Reni Farwitawati (2024) pada dasarnya menegaskan bahwa penerapan pola BLUD mampu meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas pengelolaan keuangan. Temuan tersebut terkonfirmasi dalam penelitian ini karena BLUD Laboratorium DLHP terbukti mampu merealisasikan pendapatan melampaui target setiap tahunnya. Namun, penelitian ini memperluas temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa tingginya capaian pendapatan belum tentu mencerminkan kondisi keuangan yang sehat apabila struktur pendapatannya masih sangat bergantung pada satu sumber utama dan belum diimbangi diversifikasi pendapatan yang memadai.

Selain itu, penelitian Helly Aroza Siregar dkk. (2024) mengenai diversifikasi pendapatan daerah juga mendukung hasil penelitian ini, khususnya terkait pentingnya inovasi sumber pendapatan untuk mengurangi ketergantungan fiskal. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa hambatan diversifikasi pada BLUD tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan inovasi, tetapi juga karena pola pengelolaan anggaran yang masih berorientasi operasional-rutin dan belum diarahkan pada investasi strategis pengembangan layanan baru. Temuan ini berbeda dengan penelitian Marshella Putri et al. (2024) dan Tiara Kusumadewi dkk. (2024) yang lebih menitikberatkan diversifikasi dalam konteks makro fiskal dan sektor perbankan. Penelitian ini justru menunjukkan dinamika diversifikasi pada level organisasi layanan publik daerah yang memiliki karakteristik berbeda karena harus menyeimbangkan fungsi pelayanan publik dan tuntutan kemandirian keuangan.

Kebaruan ilmiah (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada temuan bahwa permasalahan utama optimalisasi diversifikasi sumber pendapatan pada BLUD bukan hanya terletak pada rendahnya inovasi pendapatan, tetapi pada adanya "ketergantungan struktural terhadap jasa layanan utama" (*structural dependency on core service revenue*). Ketergantungan ini menyebabkan peningkatan pendapatan tidak otomatis memperkuat stabilitas keuangan organisasi karena kenaikan biaya operasional tidak diimbangi oleh pertumbuhan sumber pendapatan alternatif. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan strategis dalam pengelolaan BLUD, yaitu sumber daya dan anggaran lebih banyak digunakan untuk mempertahankan layanan rutin dibandingkan dikembangkan untuk inovasi layanan, kerja sama strategis, maupun pengembangan usaha lainnya. Temuan ini menjadi pembeda utama dengan penelitian sebelumnya karena menunjukkan bahwa tantangan utama BLUD bukan hanya

efektivitas pengelolaan keuangan, tetapi bagaimana menciptakan model diversifikasi pendapatan yang berkelanjutan tanpa mengurangi fungsi pelayanan publik.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi diversifikasi sumber pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan secara umum telah berjalan cukup baik, khususnya pada aspek efektivitas pencapaian pendapatan. Berdasarkan teori Mardiasmo, dimensi efektivitas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan BLUD tahun 2024 mencapai Rp28,32 miliar atau 131,73% dari target Rp21,5 miliar. Capaian tersebut menunjukkan bahwa layanan laboratorium masih memiliki tingkat permintaan yang tinggi dan mampu menjaga stabilitas pendapatan melalui jasa layanan pengujian lingkungan. Selain itu, kualitas layanan juga terus ditingkatkan melalui penerapan standar ISO/IEC-17025, yang berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan pengguna jasa. Namun demikian, kontribusi pendapatan BLUD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan masih relatif kecil, yaitu sekitar 0,53% dari total PAD sebesar Rp5,31 triliun, sehingga menunjukkan bahwa keberhasilan pendapatan masih bersifat internal dan belum memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah secara menyeluruh.

Pada dimensi efisiensi, penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya dan keuangan belum sepenuhnya optimal. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 BLUD masih mengalami surplus dengan pendapatan Rp27,08 miliar dan pengeluaran Rp23,69 miliar, namun pada tahun 2023 dan 2024 terjadi defisit akibat peningkatan biaya operasional hingga mencapai Rp31,23 miliar pada tahun 2024. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kenaikan pengeluaran lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Selain itu, pemanfaatan sumber daya seperti kalibrasi alat yang baru mencapai 80%, kelengkapan alat sebesar 95%, serta keterbatasan sarana laboratorium menunjukkan masih adanya potensi sumber daya yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pengembangan layanan baru dan diversifikasi pendapatan.

Sementara itu, pada dimensi ekonomis, penggunaan dana dan penetapan tarif pelayanan secara regulatif telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kepatutan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2023. Namun dalam implementasinya, penggunaan anggaran masih lebih banyak diarahkan pada kebutuhan operasional rutin dibandingkan investasi strategis untuk inovasi layanan dan pengembangan kerja sama. Kondisi tersebut menyebabkan diversifikasi sumber pendapatan belum berkembang optimal dan BLUD masih bergantung pada satu sumber utama, yaitu jasa layanan laboratorium. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi diversifikasi sumber pendapatan BLUD Laboratorium DLHP Provinsi Sumatera Selatan telah menunjukkan capaian yang baik dari sisi efektivitas pendapatan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek efisiensi dan ekonomis melalui pengendalian biaya, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, inovasi layanan, serta pengembangan kerja sama agar tercipta struktur pendapatan yang lebih beragam, stabil, dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil penelitian secara lebih komprehensif. Penelitian ini memiliki

beberapa keterbatasan seperti waktu penelitian yang relatif singkat yakni hanya 20 hari. Penelitian ini juga masih bergantung pada data internal organisasi seperti SP3B, RBA, dan laporan realisasi anggaran, sehingga terdapat keterbatasan dalam memperoleh data pembanding eksternal maupun data rinci terkait profitabilitas tiap jenis layanan laboratorium.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Kajian berikutnya dapat difokuskan pada penguatan aspek implementasi strategi diversifikasi, termasuk pengembangan layanan baru, perluasan kerja sama dengan sektor industri, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan laboratorium. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat memperluas perspektif dengan membandingkan BLUD Laboratorium DLHP Sumatera Selatan dengan BLUD sejenis di provinsi lain, sehingga dapat ditemukan pola pengelolaan pendapatan yang lebih efektif dan adaptif.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran UPTD Laboratorium yang telah memberikan izin penelitian serta dukungan data dan informasi. Terima kasih juga kepada seluruh informan yang telah membantu memberikan keterangan selama proses penelitian. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada dosen pembimbing atas arahan dan bimbingan dalam penyusunan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Bahrullah. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Konsep dan Teori*. Jakarta: Bumi Metro Jaya.

Ari Ardiansyah. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Setelah Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 3(3), 190–204. Https://Doi.Org/10.55606/Optimal.V3i3.1819

Bird, R. M. (2015). Local and regional revenues: Realities and prospects. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 33(5), 1226–1245**.** https://doi.org/10.1177/0263774X15614721

Farwitawati, R. (2005). Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). https://repository.unri.ac.id/

Hummel, D., & Kusumasari, B. (2025). Local government financial performance and decentralization in Indonesia. *Government and Policy*. https://doi.org/10.1177/0160323X251364379

Jeddawi, M. (2021). Alternatif Strategi Menekan Kesenjangan Kemandirian Fiskal Antar Daerah di Indonesia. *Jurnal Pallangga Praja*. 3(2), 51-57. https://doi.org/10.61076/jpp.v3i2.2065

Kurniawan, B., & Purwanto, E. A. (2022). Local revenue capacity and regional fiscal independence in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*.

Kusumadewi, T., Ermawati, W. J., & Irawan, T. (2024). Pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap profitabilitas dan stabilitas perbankan di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen, 10*(1), 239. https://doi.org/10.17358/jabm.10.1.239

Peters, B. G., & Pierre, J. (2016). Comparative public administration: theory and practice. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 18(4), 1–15. https://doi.org/10.1080/13876988.2016.1182908

Putri, M., Dewata, E., & Aryani, Y. A. (2024). Pengaruh diversifikasi pendapatan daerah dan dana perimbangan terhadap fiscal stress pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komunikasi, Manajemen dan Akuntansi, 17*(2), 33–40. https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2068

Salomo, R. V., & Rahmayanti, K. P. (2023). Progress and institutional challenges on local governments performance accountability system reform in Indonesia. *International Journal of Public Administration*. https://doi.org/10.1177/21582440231196659

Sam, A. A. R., dkk. (2024). Disclosure of transparency, accountability and value for money concept in public sector financial management: A systematic literature review. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting, 3*(1), 228–241. https://doi.org/10.55227/ijerfa.v3i1.245

Sinurat, Marja. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sinurat, M., & Panjaitan, H. M. (2107). Perencanaan Dan Penganggaran Daerah (Cet. 1). Bandung: Pustaka Rahmat.

Siregar, H. A., Suryani, F., & Irawati, I. (2024). Revenue Diversification Strategy to Increase the Degree of Fiscal Decentralization in Dumai City. *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen, 12*(1), 39–49. https://doi.org/10.35145/procuratio.v12i1.4205

Sulistyowati, H., & Sunaningsih, S. N. (2022). Implementasi pengelolaan keuangan Puskesmas setelah berstatus menjadi BLUD (studi kasus di Puskesmas Magelang Selatan). *Jurnal Bina Akuntansi, 10*(1), 110–131. https://doi.org/10.52859/jba.v10i1.284

Suryanto, T., & Nurdin, N. (2021). Public service agency (BLU/BLUD) and financial performance in Indonesian public hospitals. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0453

Suwanda, D., Junjunan, B. A., Affandi, A., & Rusliati, E. (2019). *Manajemen Risiko: Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Wardiah, I., dkk. (2024). Implementasi sistem informasi pengelolaan laboratorium untuk meningkatkan efisiensi kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan. *J-COSCIS: Journal of*

Computer Science Community Service, *4*(1), 62–71. https://doi.org/10.31849/jcoscis.v4i1.16268